



INOVATIF
PROGRESIF
ASPIRATIF

PPI Brief

Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia

Pandangan Dan Rekomendasi Kebijakan Untuk Potret Ketidakmerataan Pelayanan Terhadap Guru Di Daerah

Komisi Pendidikan PPI Dunia, PPI Brief No. 14 / 2020

Penulis: Januar Widakdo



RINGKASAN EKSEKUTIF

- Pelayanan pemerintah terhadap guru di daerah masih belum merata jika dilihat dari fasilitas yang diberakan. Tidak sedikit guru yang ada di daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) masih kesulitan untuk mendapatkan sarana dan prasarana untuk bahan mngajar.
- Perlu adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pemerataan pelayanan terhadap guru di daerah. Pemerintah diharapkan mempunyai program untuk pemeratakan atau redistribusi jumlah kepala sekolah dan guru yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Program bisa berupa mutasi atau penyebaran kepala sekolah dan guru dari daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan guru.
- Berangkat dari masalah-masalah yang dikemukakan, beberapa rekomendasi kebijakan telah diberikan kepada pemerintah, salah satunya adalah pemerintah dapat mendorong peran serta masyarakat untuk mengupayakan peningkatan jumlah guru yang memenuhi standar sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh perkembangan politiknya maupun perkembangan ekonominya. Tetapi, keberhasilan suatu negara dapat ditentukan juga oleh tingkat perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam dunia pendidikan. Tingkat keberhasilan dalam dunia pendidikan tak cukup dinilai dari kemajuan prestasi anak-anak Indonesia dalam ajang-ajang internasional, misalnya olimpiade matematika. Bahkan, prestasi segelintir anak berprestasi tersebut bisa memberikan pesan “menyesatkan” dan membenaran atas berbagai fenomena pengabaian sebagian besar anak yang tertinggal. Potret buram pendidikan di tanah air menjadi masalah paling serius yang dialami bangsa kita ini, mulai dari kurangnya tenaga pendidikan hingga kurangnya sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran khusus di daerah terpencil atau pedalaman.

Tenaga pengajar merupakan komponen terpenting yang harus ada di dalam proses belajar-mengajar selain siswa itu sendiri. Tidak jarang saat siswa sudah semangat datang ke sekolah, mereka harus kecewa karena tidak ada guru yang datang. Distribusi guru antara pedalaman dengan perkotaan memang berbanding terbalik. Di perkotaan terkadang kelebihan tenaga guru, sedangkan di pedalaman tenaga guru masih sangat kurang. Di pedalaman, seorang guru harus mengajar dua atau tiga kelas sekaligus. Seperti yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua.

Di kabupaten tersebut terdapat 66 sekolah, akan tetapi hanya terdapat 117 orang guru. Itu artinya setiap sekolah hanya mempunyai kurang dari dua orang guru.

Potret ketidakmerataan pelayanan terhadap tenaga pengajar atau guru di daerah merupakan tema yang sensitif dan hampir semua orang tahu permasalahannya. Perspektif guru di setiap daerah itu berbeda antara setiap pulau dan daerah yang ada. Keadaan yang ada di Pulau Jawa dan di pulau lainnya berbeda, dan fasilitasnya juga berbeda. Realitanya dapat dilihat dari Ujian Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2015. Program ini adalah bagian dari program pemerintah yang terdiri dari berbagai macam tes. Tes ujian yang dilakukan meliputi tes pedagogik, yaitu tes bagaimana cara kita mengajar, dan tes profesional ilmu kemampuan dasar. Dari hasil dari ujian keterampilan guru ini pemerintah ingin mengetahui bagaimana kompetensi guru-guru pada saat sekarang ini. Sehingga pemerintah dapat memberikan bantuan lebih lanjut. Hasil UKG pada tahun 2014 menunjukkan bahwa hasil ujian tertinggi diraih oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan terendah yaitu Provinsi Maluku Utara.

Padahal sebelum tahun 2015 ketika reformasi sudah dilaksanakan, pemerintah sudah memberikan kebijakan pendidikan yang diambil dari APBN sebesar 20%. Pemerintah daerah mendapatkan sekitar 60% dan kementerian pusat mendapatkan kurang dari 40%. Pemerintah sudah memberikan banyak sekali tunjangan baik dari segi fasilitas, gaji *income* guru dan sebenarnya sebelum reformasi bagaimana masalah yang sekarang adalah guru-guru daerah pada saat ini memang diberikan tunjangan, mereka juga diberikan dinas pendidikan semua bekerja. Pada saat ini guru daerah sudah mendapatkan pelatihan, tunjangan, sertifikasi, dan gaji yang bagus dan lain-lain, hal-hal tersebut merupakan bagian positif yang didapat oleh guru di daerah tersebut.

Masalah kependidikan yang dihadapi adalah kurangnya keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Pemerintah sudah membuat peraturan tentang sistem pendidikan dengan sangat baik, namun dalam prosesnya sistem tersebut tidak berjalan baik, bahkan terkesan berhenti di tengah jalan. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah kependidikan menunjukkan bahwa minimnya kesadaran betapa pentingnya suatu pendidikan. Dari waktu ke waktu pendidikan di Indonesia tetap berjalan di tempat dan tidak mengalami perkembangan yang baik. Pemerintah seharusnya menjadikan masalah pendidikan menjadi prioritas utama yang harus dituntaskan secepat mungkin.

PENDIDIKAN NASIONAL

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sesuai dengan visi tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

DEFINISI GURU

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Mengutip pendapat Laurence D. Hazkew dan Jonathan C. Mc Lendon dalam bukunya *This is Teaching*: “Guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas”. Sedangkan menurut Jean D. Grambs dan C. Morris Me Clare dalam *Foundation of Teaching, An Introduction to Modern Education, him.*: “Guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan”.

Apabila dilihat dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan serta secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didiknya.

KONDISI DAN MASALAH GURU DI WILAYAH PERBATASAN

Kekurangan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penyebab tidak berjalan lancar kegiatan belajar mengajar, sehingga hal itu menjadi permasalahan sendiri bagi sekolah yang ada di kawasan perbatasan. Padahal tenaga pendidik harus memiliki 7 kemampuan untuk menjadi tenaga yang profesional (Gambar 1)



Gambar 1. 7 skill untuk menjadi guru yang profesional

FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KUALITAS GURU DI INDONESIA

Penurunan kualitas guru memang disebabkan oleh sejumlah faktor, dan memang beberapa faktor tersebutlah yang mengakibatkan pada penurunan kualitas dan kinerja guru. Dalam masalah ini beberapa faktor yang menyebabkan pada penurunan kualitas guru yaitu :

1. Kurang pedulinya pemerintah akan nasib para guru.

Kurang pedulinya pemerintah akan nasib guru memang sangat mempengaruhi kualitas dan kinerja guru. Ini dikarenakan bilamana pemerintah tidak peduli akan nasib kehidupan para guru, maka kondisi ekonomi para guru pun juga akan tidak stabil. Dan ini juga akan berdampak pada kualitas guru itu sendiri.

2. Banyaknya guru yang kurang mengenal tentang teknologi (gagap teknologi)

Banyaknya guru yang kurang mengenal teknologi, ini memungkinkan para guru untuk sulit berpikir lebih maju, pasalnya teknologi ini sangat penting dalam menunjang karir seorang guru.

3. Gaji yang rendah,

Hal tampaknya juga akan menghambat peningkatan kualitas pada guru, karena penghasilan atau gaji yang rendah, itu akan mempengaruhi konsentrasi dan motivasi para guru saat mengajar.

4. Banyaknya masalah pribadi yang mendera para guru.

Banyaknya masalah pribadi yang dihadapi oleh guru dapat berdampak terhadap performance saat mengajar menurun.

5. Sikap acuh atau tidak peduli

Sikap acuh atau tidak peduli yang ditunjukkan seorang pendidik contohnya ialah masalah ketidakhadiran guru pada jam yang telah ditentukan. Pada saat sekarang ini biasanya sebab-sebab ketidakhadiran itu bermacam-macam. Misalnya, dikarenakan hal-hal kecil seperti malas, lebih mengutamakan hal pribadi dan lain sebagainya.

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS GURU

1. Sertifikasi

Sertifikasi semacam ‘ujian nasional’ bagi semua guru dari tingkat SD sampai SMA. ‘UN’ guru ini digunakan sebagai langkah pemetaan terhadap kompetensi guru secara nasional. Program ini juga penting sebagai upaya melihat sejauh mana persebaran guru-guru yang benar-benar kompeten di bidangnya. Beberapa permasalahan dalam proses sertifikasi:

- a. Penentuan guru untuk mengikuti sertifikasi,
- b. Penentuan Assessor,
- c. Proses penilaian portofolio/PLPG,
- d. Pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi,
- e. Tantangan bagi guru yang bersertifikasi.

2. Perlunya kebijakan persebaran guru-guru berkualitas

Fakta di lapangan menunjukkan: guru-guru berkualitas banyak tersebar di sekolah-sekolah favorit (*effective schools*) di perkotaan. Hal ini wajar karena mereka melihat jaminan, baik dari sisi ekonomi maupun karir yang lebih menjanjikan di sekolah-sekolah itu. Bandingkan dengan guru-guru yang ada di daerah tertinggal/terpencil.

3. Perlunya pencarian bibit unggul dalam profesi keguruan

Meningkatkan pengakuan dan penghasilan yang lebih kompetitif bagi profesi guru, sehingga hal ini bisa memikat para lulusan terbaik dari SMA untuk melanjutkan ke program keguruan.

4. Restrukturisasi lembaga-lembaga keguruan

Pemerintah perlu melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga keguruan di tanah air, terutama dari segi rekrutmen mahasiswanya, sehingga jaminan kualitasnya semakin unggul dan bisa dipertanggungjawabkan.

5. Kesejahteraan Guru

- a. Kesejahteraan: Gaji dan tunjangan yang diterima bersama gaji tiap bulan.
- b. Kurang mencukupi.
- c. Masalah Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya.

6. Beasiswa

Salah satu rangsangan bagi guru, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan dan memperluas wawasan.

7. Penghargaan

- a. Guru yang berprestasi,
- b. Berdedikasi luar biasa, dan/atau
- c. Bertugas di daerah khusus,
- d. Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus,

e. Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain (UU. No. 15 tahun 2005 bagian keenam pasal 36 dan 37).

PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA ANAK MUDA UNTUK MEMBANTU GURU/PENGAJAR DI DAERAH TERPENCIL

Hal yang bisa kita lakukan sebagai kaum milenial yang ingin ikut memajukan negara salah satunya yaitu menjadi guru di pedalaman. Menjadi guru di pedalaman adalah salah satu sumbangsih kita untuk mencerdaskan bangsa ini. Menjadi ujung tombak yang langsung terjun dan mengedukasi adik-adik kita di daerah pedalaman bisa jadi cara efektif. Adapun beberapa program yang sudah berjalan selama ini adalah:

1. Guru Garis Depan (GGD)



Gambar 2. Para volunteer Guru Garis Depan (GGD)

Guru Garis Depan adalah salah satu program pemerintah yang menerjunkan sejumlah guru ke daerah pelosok pedalaman. Nantinya, para kandidat guru ini akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang gajinya bisa mencapai 8 juta tiap bulannya. Untuk mengetahui syarat dan cara mendaftarnya kamu bisa membuka websitenya di www.gurugarisdepan.org.

2. Indonesia Mengajar



Gambar 3. Suasana saat mengajar murid dalam kelas inspirasi

Gerakan Indonesia Mengajar mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut terjun dan ambil bagian dalam perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Selain menjadi pengajar, kamu juga bisa bergabung menjadi relawan atau bahkan ikut gabung iuran. Kamu bisa mencari info lebih lanjut di Indonesiamengajar.org.

3. 1000 guru



Gambar 4. volunteer 100 guru

Sesuai dengan *tagline*-nya: *traveling & teaching*, seribuguru.org mengajak anak muda berusia 17-35 tahun untuk ikut terjun dan mengajar langsung adik-adik kita dari Sabang-Merauke.

Hingga November 2016, 1000 guru telah membantu kebutuhan 5000 anak sekolah pedalaman di 18 provinsi di Indonesia.

4. Komunitas Jendela



Gambar 5 Komunitas Jendela dunia

Komunitasjendela.org yang terbentuk di Yogyakarta pada 12 Maret 2011 ini berfokus pada pengadaan perpustakaan bagi adik-adik di daerah pedalaman. Tak hanya membangun perpustakaan, mereka juga ikut mengedukasi anak-anak di pelosok. Sekarang ini, komunitas Jendela sudah memiliki cabang di beberapa daerah seperti Bandung, Jakarta, Lampung, Bengkalis, Malang, Sumut, Jember, Bangka.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tujuan pembangunan nasional dan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Seluruh anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan dasar di manapun di wilayah NKRI ini. Maka, problematika dalam sebaran kepala sekolah dan guru khususnya di wilayah 3T harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Rekomendasi yang dapat diusulkan kepada para pengambil kebijakan baik di pemerintah daerah maupun kementerian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan mempunyai program untuk pemeratakan atau redistribusi jumlah kepala sekolah dan guru yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk

wilayah 3T. Program bisa berupa mutasi atau penyebaran kepala sekolah dan guru dari daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan guru.

2. Mengadakan pengangkatan atau rekrutmen guru untuk memenuhi kekurangan guru oleh pemerintah daerah yang wilayahnya termasuk dalam kategori 3T berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
3. Pengangkatan atau rekrutmen guru hendaknya mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Kebutuhan guru tidak mungkin bisa dipenuhi sekaligus agar segera bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemenuhan kebutuhan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada anggaran yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota di wilayah 3T. Paling tidak pemerintah kabupaten/kota harus memiliki rancangan dalam pemenuhan kebutuhan guru.
4. Pemerintah agar mendorong peran serta masyarakat untuk mengupayakan peningkatan jumlah guru yang memenuhi standar sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Pemerintah memberikan *reward* yang menarik agar memotivasi para guru yang profesional untuk dapat mengajar di daerah-daerah terpencil. Kesejahteraan guru yang mengajar di daerah pedalaman juga harus diperhatikan, mungkin lebih baik kalau mereka didirikan rumah tinggal dekat dengan sekolah tempat mereka mengajar sehingga jarak tempuhnya tidak terlalu jauh.



DAFTAR PUSTAKA

<http://www.seputarmalang.com/info/info-pendidikan/potret-pendidikan-di-indonesia/11967>

PPI TV. (2020, 2 Maret). “[LIVE] Potret ketidakmerataan pelayanan terhadap guru di daerah. (<https://open.spotify.com/episode/0wWyswZAFUjP8Sbl22ggM0?si=BGKXmvvQS0WLVxBY09mvbw>)

<https://penanegeri.com/kekurangan-guru-sertu-deni-arya-bantu-mengajar-di-sekolah-perbatasan/>

<https://www.idntimes.com/life/education/pinka-wima/program-guru-pelosok-yang-wajib-diikuti-anak-muda>

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132308486/pendidikan/materi+pertemuan+13.pdf>

Buchori, Mochtar. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogya, Cetakan Pertama, 1994, hal 23.

Tilaar, H.A.R. *Paradigma Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta. Cetakan Kedua, 2004, hal 144.

<http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-20-tahun-2003-tentang-Sisdiknas.pdf> Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

[http://sindikker.ristekdikti.go.id/dok/UU/UUNo142005\(Guru%20&%20Dosen\).pdf](http://sindikker.ristekdikti.go.id/dok/UU/UUNo142005(Guru%20&%20Dosen).pdf) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

http://humaniora.uin-malang.ac.id/phocadownload/publikasi_ilmiah/Umi-Machmudah-PROFESIONALISME-GURU.pdf hlm.1

<https://oioey.wordpress.com/2016/07/19/upaya-pemerintah-dalam-meningkatkan-kualitas-guru-di-indonesia/>



TENTANG PENULIS



Januar Widakdo adalah Mahasiswa Doktoral dalam bidang *Applied Science and Technology* di *National Taiwan University of Science and Technology*, Taiwan, serta Anggota Komisi Pendidikan PPI Dunia.